

# MANIFESTASI KEBIJAKAN SURAT EDARAN KEMENDIKBUD NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG PELAKSANAAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN DALAM MASA DARURAT PENYEBARAN CORONA VIRUS

*by* 11239-30595-1 11239-30595-1

---

**Submission date:** 24-Jun-2021 06:10AM (UTC+0700)

**Submission ID:** 1611294081

**File name:** Artikel\_Rev-11239-30595-1-RV.docx (136.27K)

**Word count:** 3921

**Character count:** 26309

**MANIFESTASI KEBIJAKAN SURAT EDARAN KEMENDIKBUD  
NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG PELAKSANAAN KEBIJAKAN  
PENDIDIKAN DALAM MASA DARURAT PENYEBARAN CORONA  
VIRUS**

**ABSTRACT**

*Education is a process to increase dignity by having self-potential, intelligence, and talent interests according to the abilities of students. As one of the government's efforts in trying to continue teaching and learning activities, the Ministry of Education and Culture of the Republic of Indonesia issued Circular Letter Number 4 of 2020 concerning the Implementation of Educational Policies in the Emergency Period for the Spread of Coronavirus Disease (Covid-19). This study seeks to answer the question of how the manifestation of the Ministry of Education and Culture's Policy Number 4 of 2020 using the Edward III policy implementation indicators and what the impact of this policy is for all policy actors. The type of research used is library research with a qualitative approach. Sources of internal data are obtained through documents in written form such as scientific books, scientific essays, regulations, journals, and news relevant to this research, as well as relevant previous research results to obtain answers and theoretical foundations on the problems to be studied. researched. The results of the study indicate that (a) Communication between students and teachers still faces serious obstacles since face-to-face interaction is not allowed so that the coordination process between teachers, students, and parents cannot be maximized. (b) Resources, in this case, are teachers, facilities, and information to be fulfilled with support from the government. (c) The disposition that occurs tends to be forced because of the circumstances and the policy objectives that must be achieved, both the objectives of the education policy and the objectives of the circular policy. (d) The bureaucratic structure provides convenience in implementing online learning. The positive impact of this manifestation is increasing the competence of students and teachers as well as parents of students in using technology, media, and online learning resources. The negative impact is that the pedagogic aspect of learning cannot be achieved optimally.*

**Key words:** *education, coronavirus disease, society*

**ABSTRAK**

Pendidikan merupakan proses untuk meningkatkan martabat dengan memiliki potensi diri, kecerdasan dan minat bakat sesuai dengan kemampuan peserta didik. Sebagai salah satu upaya pemerintah dalam berusaha tetap melangsungkan kegiatan belajar mengajar, maka Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia mengeluarkan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran *Coronavirus Disease* (Covid-19). Penelitian ini berusaha untuk menjawab pertanyaan bagaimana manifestasi Kebijakan Kemendikbud Nomor 4 Tahun 2020 dengan menggunakan indikator implementasi kebijakan Edward III dan apa

dampak dari kebijakan ini bagi semua pelaku kebijakan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan dengan pendekatan kualitatif. Sumber data dalam didapatkan melalui dokumen-dokumen dalam bentuk tulisan seperti buku ilmiah, karangan ilmiah, peraturan-peraturan, jurnal, maupun berita-berita yang relevan dengan penelitian ini, serta hasil penelitian sebelumnya yang relevan untuk mendapatkan jawaban dan landasan teori mengenai masalah yang akan diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (a) Komunikasi antar peserta didik dan guru masih menuai hambatan yang serius disebabkan tidak diperbolehkannya proses interaksi tatap muka sehingga proses koordinasi antara guru, dengan peserta didik, orang tua belum bisa maksimal. (b) Sumber daya dalam hal ini adalah guru, fasilitas dan informasi menjadi terpenuhi dengan adanya dukungan dari pemerintah. (c) Disposisi yang terjadi cenderung dipaksakan karena keadaan dan tujuan kebijakan yang harus dicapai baik tujuan kebijakan pendidikan maupun tujuan kebijakan surat edaran. (d) Struktur birokrasi memberikan kemudahan dalam melaksanakan pembelajaran *daring*. Dampak positif manifestasi ini adalah meningkatkan kompetensi siswa dan guru serta wali murid dalam menggunakan teknologi, media dan sumber belajar *daring*. Dampak negatifnya adalah aspek pedagogic pembelajaran tidak dapat dicapai secara maksimal.

**Kata Kunci:** Pendidikan, *Coronavirus Disease* , Masyarakat

## PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara konstitusional, Konstitusi sangat penting terhadap bangsa dan negara berdasarkan sistem hukum dan politik, konstitusi dan Negara tidak bisa dipisahkan. Pada dasarnya negara konstitusional menjaga dan melindungi serta melaraskan hak asasi manusia dan hak pemerintah. Konstitusi negara Indonesia merupakan UUD 1945 yang disahkan oleh PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) setelah kemerdekaan tanggal 18 Agustus 1945. Undang-undang 1945 merupakan peraturan negara dengan kedudukan tertinggi. Oleh karenanya, masyarakat dan kontitusi adalah segi yang berbeda namun semua itu memiliki makna yang sangat penting terhadap perkembangan suatu negara.

Manusia tidak bisa berdiri sendiri mereka memiliki ragam budaya dengan

latar belakang berda-beda. Berawal dari keluarga kecil kemudian berencana untuk berkembang disebuah wilayah atau kampung dan bersosialisasi antar ragam budaya maka manusia dapat disebut juga dengan masyarakat. masyarakat Indonesia memiliki struktur sosial. Masyarakat memiliki peranan penting dalam kesatuan soasial. Menurut pendapat para ahli yaitu Emile Durkhiem bahwasannya masyarakat sebagai objek individu yang didalamnya terdiri dari beberapa kelompok manusia. Pada kehidupan manusia bertemu dengan manusia lain dengan peran yang berbeda-beda yang nantinya akan menjadi satu kesatuan yang utuh dalam suatu negara<sup>1</sup>.

Pada perkembangan bangsa dan negara perlu pengembangan di bidang pendidikan dengan memanfaatkan teknologi sebagai alat penunjang peserta

---

<sup>1</sup> Bambang Tejkusumo, (2014), "*Dinamika Masyarakat Sebagai Sumber Belajar Ilmu*

*Pengetahuan Sosial*", Geodukasi, Vol III No 1, 2014, hal 38.

didik. Pendidikan merupakan proses belajar mengajar dengan tujuan untuk mencapai cita-cita anak Indonesia dalam perkembangan pendidikan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 pada pasal 1 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya, namun dengan demikian di jagat raya dihebohkan dengan peristiwa pandemi Covid-19.

Pemerintahan membuat kebijakan untuk memperkecil penularan virus diberbagai bidang, salahsatu bidang tersebut dibidang pendidikan. Kebijakan yang dibuat oleh pemerintahan dibidang pendidikan dengan meniadakan pembelajaran yang asalnya pembelajaran melalui tatap muka menjadi pembelajaran dengan menggunakan sistem jarak jauh. Tanpa adanya kesiapan apapun sekolah dan instansi lainnya mengikuti kebijakan dari pemerintah dengan sistem pembelajaran jarak jauh. Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia telah mengeluarkan surat edaran nomor 4 tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran *Coronavirus Disease* (Covid-19) pada poin ke 2 yaitu proses belajar dari rumah dilaksanakan dengan ketentuan.

Beberapa kebijakan, sosialisasi tentang perkembangan teknologi atau disebut dengan era indudtri 4.0 belum maksimal membuat pendidikan mencapai proses transformasi digital pendidikan di Indonesia. Covid-19 memberikan

dampak yang sangat luar biasa dalam aspek perkembangan teknologi dan informatika. Dampak positif dan negatif dalam penerapan sistem pembelajaran ini pemerintah dapat memberikan kebijakan pendidikan dengan menggunakan sistem online, agar Indonesia siap menghadapi persaingan global khususnya persaingan pendidikan di masa pandemi Covid-19 dengan mewujudkan pendidikan yang berkualitas.

Penelitian ini akan membahas mengenai: Pelaksanaan Kebijakan Dalam Masa Darurat Penyebaran *Coronavirus* menurut surat keputusan menteri pendidikan dan budaya pada surat edaran nomor 4 Tahun 2020 dan respon masyarakat terhadap implementasi kebijakan pada masa darurat.

## **PEMBAHASAN**

### **a. Indikator Manifestasi Kebijakan Surat Edaran Kemendikbud Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran Corona Virus**

Masyarakat dan negara merupakan kedua pihak yang harus menyatu untuk mewujudkan cita-cita bangsa. Untuk mewujudkan cita-cita bangsa maka negara membuat kebijakan di bidang pendidikan, pendidikan sebagai dasar pengembangan dan pembentukan karakter kepribadian peserta didik. Pendidikan dilakukan pada lingkungan sekolah, madrasah, pesantren dan perguruan tinggi. Dalam penyampaian materi, pengajar memiliki tujuan utama

setiap proses pengajaran mengarahkan suatu proses yang pengajar rencanakan baik penyampaian materi terhadap peserta didik dengan memberikan sebuah ilmu yang lebih profesional.

Tertuang dalam Undang-Undang (UU) No. 20 Tahun 2003 mengenai sistem pendidikan nasional menyatakan bahwa pembelajaran merupakan suatu proses interaksi peserta didik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Pada hakikatnya pembelajaran merupakan suatu kegiatan yang mengatur yang dapat mengantarkan peserta didik sehingga mereka dapat membentuk dan menanamkan peserta didik dengan proses pembelajaran. Proses belajar juga merupakan proses mengamalkan bimbingan kepada peserta didik dalam melakukan keberlangsungan proses belajar mengajar.

Pembelajaran adalah sekumpulan aktivitas yang melibatkan beberapa informasi dan lingkungan disekitar yang dapat disusun untuk memberikan kemudahan pada peserta didik dalam proses belajar mereka<sup>2</sup>. Pada lingkungan tidak berupa tempat, akan tetapi juga media, peralatan, perantara serta motede yang digunakan dan diperlukan saat

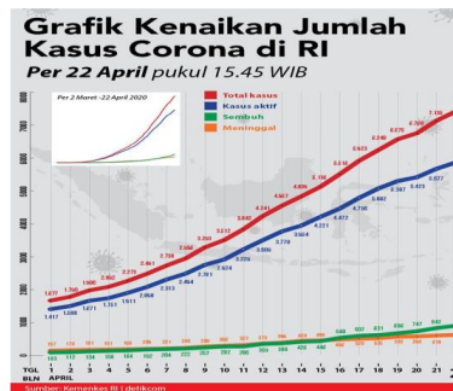
proses belajar mengajar untuk menyampaikan sebuah informasi baik melalui media online, buku dan majalah. Pada Undang-Undang (UU) No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) pasal (12) bahwasannya setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya dengan tujuan untuk memperoleh pendidikan mencerdaskan dirinya, dan meningkatkan kualitas hidupnya, menjadi manusia beriman bertaqwa, bertanggungjawab, berakhlak mulia, dan sejahtera sesuai dengan hak asasi manusia”

Saat ini negara-negara di dunia termasuk Indonesia mengalami dampak COVID 19 diberbagai bidang, salah satu bidang yang terdampak adalah bidang pendidikan. Salah satu kebijakan yang diambil pemerintah di bidang pendidikan dalam merespon dampak COVID 19 ini adalah dengan menghentikan proses pembelajaran di kelas dengan menggantikan pembelajaran jarak jauh menggunakan jaringan internet (*Daring*) yang biasanya proses pembelajaran dilakukan dari rumah untuk mengurangi tingkat persebaran virus tersebut. Ketika WHO menyebutkan bahwa wabah COVID 19 sebagai wabah pandemic

---

<sup>2</sup> Jamil Suprihatin, (2013), *Guru Profesional*, Ar-Ruzz media, Yogyakarta, hal 75

yang sangat mematikan, belum ditemukannya obat dan metode pengobatan untuk memutus penularan virus corona, maka pemerintah mengeluarkan kebijakan yakni kebijakan *lockdown*. Berikut ini adalah gambaran kasus COVID 19 di Indonesia.



Dilihat dari grafik pergerakan kasus *coronavirus* dilihat pada 22 april menunjukan kasus positif sebanyak 7.418 kasus, sedangkan kasus aktif ada 5.870 kasus, total yang sembuh ada 913 kasus dan kasus yang meninggal ada 635 kasus hal ini pemerintahan membuat kebijakan untuk memperkecil penularan virus diberbagai bidang, salah satu bidang tersebut dibidang pendidikan. Kebijakan yang dibuat oleh pemerintahan dibidang pendidikan dengan meniadakan pembelajaran yang awalnya pembelajaran melalui tatap muka menjadi pembelajaran dengan menggunakan

sistem beajaran dengan jarak jauh dengan menggunakan jaringan internet. Tanpa adanya kesiapan apapun sekolah dan instansi lainnya mengikuti kebijakan dari pemerintah dengan sistem pembelajaran jarak jauh. Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia telah mengeluarkan suarut edaran nomor 4 tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran *Coronavirus Disease* (Covid-19) pada poin ke 2 yaitu proses belajar dari rumah.

Beberapa respon masyarakat/orangtua wali murid bervariasi terhadap pelaksanaan proses pembelajaran dari rumah berlangsung. Beberapa orangtua memberikan tanggapan baik dan kurang baik terhadap pelaksanaan kebijakan menteri pendidikan pada program belajar dari rumah, hal ini dapat disebabkan oleh pengaruh lingkungan, teman, saudara, ketetapan kebijakan, pelaksanaan dan peranan orang tua dalam pengawasan pembelajaran dari rumah perlu mendapat perhatian yang lebih serius.

Pada pelaksanaan kebijakan pemerintah ada beberapa indikator untuk mengukur keberhasilan dari sebuah kebijakan dimana antara indikator memiliki sifat yang saling berhubungan indikator tersebut diantaranya

komunikasi, pihak yang dilibatkan, pelaksanaan, struktur birokrasi dan disposisi. Hal ini menurut pendapat George Edwards III dalam Kismartini (2014:12). Serta faktor penghambat dan pendukung implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Edwards III.

### **1) Komunikasi**

Komunikasi adalah salah satu faktor penting dalam suatu proses kebijakan dalam mengirimkan pesan informasi dari sebuah kebijakan, isi peraturan dan keterampilan aktor dalam mengkomunikasikan menjadi tolak ukur sebuah keberhasilan program. Indikator dalam sebuah implementasi kebijakan harus bersifat efektif, harus akurat, konsisten dan dapat dikomunikasikan dengan tepat. Dalam komunikasi ada 3 variable yaitu kejelasan, konsistensi dan transmisi hal ini dapat mengukur keberhasilan dalam berkomunikasi. Adapun komunikasi dalam penelitian ini dengan mengkoordinasi pelaksanaan kebijakan dalam masa darurat penyebaran virus khususnya dibidang pendidikan. Berdasarkan hasil penelitian bahwa pelaksanaan kebijakan perlu adanya komunikasi dari pihak pelaksana dengan baik dan benar serta memberikan pemahaman kepada target dari sebuah kebijakan agar memberikan dampak

positif pada proses pelaksanaan kebijakan yang dikeluarkan oleh Menteri pendidikan dan budaya. Komunikasi antar peserta didik dan guru memang masih menuai hambatan yang serius disebabkan tidak diperbolehkannya proses interaksi tatap muka sehingga proses koordinasi antara guru, dengan peserta didik, orang tua belum bisa maksimal, dukungan pendanaan yang minim yang diberikan pemerintah hal ini sangat berpengaruh terhadap eksistensi dari kebijakan. Serta pengawasan dimasa pandemi terhadap peserta didik yang sangat lemah.

### **2) Sumber daya**

Sumber daya merupakan indikator penting dalam proses pelaksanaan kebijakan berlangsung. George Edwards III dalam Kismartini (2014:12) bahwa sumberdaya ini masih cenderung kurang efektif maka setidaknya dalam pelaksanaan kebijakan harus jelas, konsisten dan efektif, bebrapa unsur-unsur yang mempengaruhi keberhasilan sumber daya diantaranya staff, informasi dan fasilitas.

Berdasarkan penelitian berdasarkan sumberdaya yang terkait pada kemampuan aktor implementor dalam mengomunikasikan kebijakan kepada peserta didik, serta ketersediaan sarana

terhadap peserta didik menjadi ukuran keberhasilan dari sebuah kebijakan. Pemerintah dalam hal ini memberikan sarana berupa kuota internet sebagai sumber sarana kebutuhan pembelajaran yang dilakukan secara daring. Namun masih ada ditemukan peserta didik yang tidak mempunyai sarana prasarana maka peserta didik diperbolehkan melakukan pembelajaran di sekolah dengan menggunakan protokol kesehatan.

Informasi dan koordinasi antar masyarakat (orang tua), kepada peserta didik dan para guru dan stakeholder yang terlibat dalam pelaksanaan program kebijakan sangatlah penting bagi jalannya proses pelaksanaan suatu kebijakan. Sehingga kebijakan bisa berjalan sesuai dengan tujuan dan harapan. Jadi faktor kunci keberhasilan implementasi kebijakan terletak pada Sumberdaya dengan melibatkan guru, masyarakat (wali murid) dan peserta didik dan koordinasi antar stakeholder.

### **3) Disposisi**

Indikator ketiga adalah disposisi atau kecenderungan, indikator ini mempunyai konsekuensi peran penting dalam pelaksanaan implementasi kebijakan agar efektif. Perlu adanya dukungan dalam mengerjakan implementasi kebijakan. Tanpa adanya

dukungan kebijakan dapat berpengaruh dalam melakukan kebijakan, maka dari itu dalam pelaksanaan suatu kebijakan bisa efektif pelaksana kebijakan perlu memahami apa yang akan dilakukan dan perlu memiliki kompetensi untuk melakukan.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa disposisi pelaksana implementasi kebijakan dalam melaksanakan program yang tertera pada surat edaran no 4 tahun 2020 ini cenderung dipaksakan untuk bisa terlaksana dengan baik dan sesuai dengan aturan. Para pelaksana kebijakan dalam hal ini seperti peserta didik, orang tua siswa, guru, tenaga kependidikan / tata usaha, dan kepala sekolah. Kondisi yang terpaksa ini dapat terlihat dari kompetensi guru yang selama ini terfokuskan pada pembelajaran luring, harus dirubah secara sistematis dengan sistem pembelajaran daring, sehingga guru akhirnya melakukan inovasi metode pembelajaran masing-masing sesuai dengan kemampuannya dalam berteknologi-informasi-komunikasi. Dari segi orang tua, diaman orang tua yang selama ini menyerahkan pendidikan anaknya 100% ke guru disekola, terpaksa harus *update* pelajaran anaknya agar bisa mendampingi anaknya dalam memahami mata pelajaran. Selain itu orang tua

dituntut lebih untuk menyediakan pranti belajar dari seketika itu juga.

#### **4) Struktur birokrasi**

Indikator yang terakhir adalah variable struktur birokrasi ini merupakan struktur pemerintahan dalam melaksanakan kebijakan publik dengan adanya kerjasama antara pihak yang terkait dengan banyak orang. Berdasarkan hasil penelitian dalam pembagian tugas sudah baik namun dalam pelaksanaan implementasi kebijakan belum adanya peraturan yang mengacu pada *Standart Oprasional Prosedure* pelaksanaan pembelajaran daring yang ada. Struktur birokrasi harus memberikan pelayanan yang baik dorongan serta dukungan terhadap keberhasilan pelaksanaan kebijakan pada masa darurat, walaupun beberapa aktivitas di sekolah masih belum efektif karena pembatasan menyebabkan dinilai kurang efektif dan efisien bagi peserta didik.

#### **b) Dampak Kebijakan Surat Edaran Kemendikbud Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran Corona Virus**

Pembelajaran yang dilakukan di musim seperti ini memberikan dampak

positif bagi pengawasan orangtua/walimurid terhadap perkembangan siswa namun di lain pembelajaran di era pandemi memiliki dampak negatif, pembatasan juga sangat perlu dalam interaksi langsung maupun tidak langsung, hal ini dapat terjadi pada situasi tertentu. Pembatasan sosial ini perlu diterapkan di masyarakat sosial dan anak pada tingkat sekolah dasar untuk pencegahan teridentifikasi virus, dampak positif dan negatif di lain kurang terjangkau pada pembelajaran sekolah.

Peranan orang tua dalam perilaku peserta didik di lingkungan memberikan suatu inovasi kepada masyarakat untuk memperoleh ilmu pengetahuan, keterampilan serta mengembangkan lingkungan hidup dengan kualitas hidup bersih dan nyaman. Inovasi yang dilakukan oleh peserta didik bisa dilihat dari segi lingkungan saat ini, peserta didik menerapkan protokol kesehatan dengan menggunakan masker, handsanitazier serta mencuci tangan untuk pencegahan penularan virus covid-19, dengan itu peserta didik sudah menerapkan pendidikan lingkungan cara hidup yang sehat.

Pelayanan publik juga memberikan kontribusi terhadap pembelajaran daring . Pelayanan Publik Pelayanan umum atau

pelayanan publik menurut Wasistiono dalam Hardiyansyah (2011:11) adalah pemberian jasa, baik oleh pemerintah, pihak swasta atas nama pemerintah ataupun pihak swasta kepada masyarakat, dengan atau tanpa pembayaran guna memenuhi kebutuhan dan atau kepentingan masyarakat. Berbeda dengan pendapat di atas, Tjandra (2005) berpendapat bahwa: “pelayanan publik atau pelayanan umum sebagai segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggungjawab dan dilaksanakan oleh instansi pemerintah di pusat, di daerah, dan lingkungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan”<sup>3</sup>.

Dalam Undang-Undang No 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik bahwasannya serangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan publik bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang dan jasa atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan

publik. Kedudukan UU pelayanan publik menunjukkan bahwa masyarakat juga perlu dukungan pelayanan dari pemerintahan baik dari segi administratif dan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mendukung perkembangan bangsa dan negara. Layanan publik yang diberikan oleh pemerintah di masa pandemi salah satunya dibidang sarana yaitu bantuan kouta data internet diatur oleh Persejjen Kemendikbud Nomor 14 tahun 2020. Pada peserta didik jenjang Paud dan sekolah dasar, sekolah menengah mendapatkan 4gb perbulan dengan rincian 5gb kouta umum dan 37gb kouta belajar. Sedangkan untuk mahasiswa dan dosen 50gb perbulan dengan kouta umum 5gb dan 45gb kouta belajar.

Pelaksanaan belajar dari rumah harus dilakukan dimasa pandemi saat ini karena seorang murid merupakan wujud nyata bagi perkembangan bangsa dan negara. Pelaksanaan sistem daring ini membuat siswa merasa mandiri serta memiliki tanggung jawab terhadap kewajiban yang semestinya dilakukan. Aplikasi juga membantu perkembangan pembelajaran baik normal maupun di masa pandemi saat ini. Pastinya pembelajaran daring mengalami

---

<sup>3</sup>W. Riawan Tjandra, SH., M.Hum, (2005)  
“Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Daerah  
Dalam Pelayanan Publik “, Pembruan hal. 55

beberapa kendala saat pelaksanaan daring berjalan. Dilihat dari segi alat perangkat pembelajaran daring sudah banyak siswa yang memiliki *smart phone* sendiri ataupun milik orang tua. Pada hakikatnya jika siswa yang tidak mempunyai perangkat penting dalam mendukung dalam pembelajaran maka berdampak pada penyelesaian tugas-tugas mereka yang pasti akan tidak tepat waktu.

Pengembangan pembelajaran daring juga memerlukan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan pembelajaran termasuk sarana dan prasana dalam satuan pendidikan termasuk segala kebutuhan peserta didik di masa pandemi ini. Hal yang perlu diketahui fasilitas atau sarana yang harus di miliki seperti gadget, hp dan lab komputer sebagai penunjang keberlangsungan pembelajaran daring. Perlu adanya dukungan dari orangtua sehingga peserta didik dapat melakukan penyesuaian terhadap perkembangan teknologi sehingga tetap relevan terhadap perubahan yang berlangsung dengan cepat.

Pendidikan merupakan proses untuk meningkatkan martabat dengan memiliki potensi diri, kecerdasan dan minat bakat sesuai dengan kemampuan peserta didik. Peserta didik juga

memberikan dampak positif bagi perkembangan bangsa yang maju, pendidikan perlu mengantisipasi persaingan global di bidang IPTEK. Perkembangan ipteks yang sangat maju pendidikan di Indonesia dengan melakukan penyesuaian terhadap perkembangan teknologi. Peranan orang tua pada pembelajaran daring beliau sebagai pengganti sebagai guru yang turut ikut andil mendukung potensi peserta didik. Namun disisi lain peran orang tua juga perlu mewaspadai terhadap peserta didik yang memiliki ketergantungan pada media elektronik, internet khususnya. Komunikasi juga perlu dalam hal perkembangan pembelajaran daring tidak hanya melalui jaringan namun orang tua juga perlu interaksi langsung terhadap peserta didik hal ini memiliki tujuan untuk membangun interaksi komunikasi dengan menggunakan media internet.

Peserta didik juga membutuhkan bimbingan serta arahan terutama dari orangtuanya sendiri. Peran orang tua sebagai fasilitator murid serta pengganti guru selama pembelajaran dilakukan dirumah menggunakan metode daring. Seorang guru juga memiliki peran penting dalam penyampaian materi, guru mengupayakan pengajaran semaksimal

mungkin agar peserta didik dapat memahami materi yang telah disampaikan oleh guru. Peran guru dan orang tua sangatlah penting pada perkembangan pembelajaran daring mereka semua adalah motivator dalam mengembangkan keterampilan dalam ilmu pengetahuan yang diberikan oleh peserta didik. Program belajar dari rumah adalah salah satu upaya dari kementerian pendidikan dan budaya No 4 tahun 2020. Program ini turut serta membantu pendidikan pada kalangan peserta didik di Indonesia pada masa pandemi. Dengan keterbatasan jaringan internet dilihat dari segi ekonomi dan segi geografis.

Dilihat dari analisis lingkungan di masa pandemi bawasannya respon masyarakat terhadap surat edaran No 4 Tahun 2020 dinilai hampir 70% masyarakat menganggap kebijakan kemendikbud membuat orangtua merasa ketidakmampuan dalam pembelajaran, mempersulit tingkat pendidikan jangka panjang, serta kurang memahami dalam jaringan IPTEK dan rendahnya pengawasan terhadap peserta didik. Hanya 30% masyarakat menganggap kebijakan pada Surat edaran kemendikbud sangat cocok untuk pembelajaran di musim pandemi. Berdasarkan permasalahan pertama

dalam pembelajaran dari rumah adalah *Coronavirus*, pengaswan orangtua sangat minim mengakibatkan rasa tanggung jawab terhadap tugas peserta didik, ketidak efektifan dalam pola pembelajaran daring.

Pada Surat Edaran No 4 Tahun 2020 memberikan dampak positif bagi masyarakat diantaranya orangtua tidak perlu mengeluarkan biaya sekolah peserta didik, memunculkan sikap kemandirian terhadap peserta didik, waktu dengan keluarga, saudara lebih banyak, dapat membantu pekerjaan rumah serta membangun karakter peserta didik serta masyarakat, disisi lain juga memberikan dampak negatif bagi masyarakat yang sibuk dengan aktivitas seperti bekerja maka peserta didik dinilai kurang efektif pada pembelajaran daring, akses jaringan yang tidak merata seringkali siswa atau masyarakat merasa kesulitan hal ini berpengaruh terhadap pembelajaran daring.

## **KESIMPULAN**

Tanggapan masyarakat pada kebijakan kemenndikbud nomor 4 tahun 2020 daring terbilang variatif, pada pandemi Covid-19 yang menyebar tahun maret 2020 hingga saat ini pembelajaran daring merupakan pilihan dalam pencegahan penularan Covid-19. Respon

masyarakat (walimurid) terhadap pembelajaran daring mereka menyikapi aktivitas yang berbasis sistem daring dengan teknis kegiatan belajar mengajar beralih menjadi pekerjaan rumah atau yang biasa disebut PR. Komunikasi yang dilakukan antara murid dan walimurid masih cenderung kurang, sumberdaya yang dilihat adalah guru sebagai wadah dalam penyampaian materi dan tugas terhadap peserta didik serta fasilitas penunjang kouta internet, sikap pelaksana program pemerintahan perlu dukungan pihak sekolah dan masyarakat pada perkembangan pembelajaran pada masa darurat, struktur birokrasi kurangnya pihak sekolah dalam melaksanakan SOP pembelajaran dimasa darurat beberapa temuan peneliti mengambil teori untuk mengidentifikasi permasalahan pada kebijakan pembelajaran di masa darurat hal ini menurut pendapat George Edwards III dalam Kismartini (2014:12). Proses pembelajaran yang dilakukan dengan waktu yang cukup lama memberikan peserta didik merasa bosan untuk berinteraksi terhadap pembelajaran sekolah. Dalam problematika yang dihadapi oleh orang tua saat ini kegiatan belajar mengajar dimasa pandemi Covid-19 seluruh aktivitas yang dilakukan mengalami transformasi digital tidak

semua orangtua faham terkait dengan pembelajaran daring. Bagi orangtua yang memiliki pemahaman yang lebih terhadap teknologi mereka memberikan sebuah inovatif pembelajaran daring tidak hanya melalui materi dari guru akan tetapi peserta didik juga dapat diarahkan melalui jaringan internet lainnya dengan mencari materi sesuai dengan kebutuhan peserta didik.

#### **SARAN**

1. Kementrian pendidikan dan budaya perlu lebih intensif melakukan sosialisai kepada target kebijakan dan sasaran kebijakan dan lebih meningkatkan dalam mengkoordinasikan antar pihak yang terkait khususnya, agar hasil evaluasi peserta didik sesuai dengan tujuan awal pembuatan kebijakan dimasa darurat coronavirus.
2. Sumberdaya juga perlu ditingkatkan kembali khususnya di kouta pendidikan banyak siswa yang belum mendapatkan secara rata sebaiknya pemerintah memberikan kouta internet secara menyeluruh untuk penunjang pendidikan. dan perlunya pembangunan infrastruktur dan suprastuktur hingga kelevel pedesaan.

3. Perlu dukungan antara siswa dan orangtua yang kuat terutama dipihak sekolah dengan pengawasan yang intens agar pembelajaran dapat berjalan semestinya.
4. Bagi peserta didik hendaklah mampu berniat bersungguh-sungguh pada proses belajar mengajar dengan belajar lebih baik, dengan lebih bijak dalam memanfaatkan dan penggunaan media elektronik dengan baik.
5. Bagi orangtua hendaklah mampu menggantikan peran guru dirumah sebagai pendamping guru dan mengawasi anak dengan baik. hendaklah orang tua memberikan pengajaran dengan baik agar peserta didik memiliki sikap tanggung jawab terhadap tugas dan kewajiban sebagai siswa, serta orangtua memberikan contoh kejujuran dengan memberikan pembelajaran yang lebih baik.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

##### **BUKU**

- Jamil Suprihatin, (2013), Guru Profesional, Ar-Ruzz media, Yogyakarta, hal 75
- W. Riawan Tjandra, SH., M.Hum, (2005) "Peningkatan Kapsitas

- Pemerintahan Daerah Dalam Pelayanan Publik", Pembruan hal.55
- Siagian, Sondang P. 2014. Filsafat Administrasi. Jakarta: Bumi Aksara
- Subarsono. 2005. Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta:Pustaka Belajar
- Sudiro.2018. Evaluasi kebijakan Pendidikan, Teori Konsep, dan implemntasi dalam pengelolaan bantuan operasional sekolah. Yogyakarta: Hikam Media Utama.

##### **JURNAL**

- Bambang Tejokusumo, (2014), "Dinamika Masyarakat Sebagai Sumber Belajar Ilmu Pengetahuan Sosial", Geodukasi, Vol III No 1, 2014, hal 38. Diakses 28 Mei 2020, 09.10
- Arnesi, Novita dkk. 2015. Penggunaan Media Pembelajaran Online-Offline dan Komunikasi Interpersonal terhadap Hasil Belajar Bahasa Inggris. Jurnal teknologi informasi & komunikasi dalam pendidikan. Vol 2. Nomor 1 Juni 2015
- Handayani, Lina. 2020. Keuntungan, kendala dan solusi pembelajaran online selama pandemi Covid-19 studi pada SMPn 3 Bae Kudus. Jurnal industrial engineering dan

management research (jiemari). Vol  
1 No 2 Juli Tahun 2020

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999  
tentang Hak Asasi Manusia pasal  
(12)

**UNDANG- UNDANG**

Persesjen Kemendikbud Nomor 14 tahun  
2020.

Surat edaran Nomor 4 Tahun 2020  
peraturan tentang pelaksanaan  
kebijakan pendidikan dalam masa  
darurat penyebaran Coronavirus  
Disease (Covid-19) poin ke 2 yaitu  
proses belajar dari rumah

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003  
tantang Pendidikan

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009  
tentang pelayanan publik

# MANIFESTASI KEBIJAKAN SURAT EDARAN KEMENDIKBUD NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG PELAKSANAAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN DALAM MASA DARURAT PENYEBARAN CORONA VIRUS

---

## ORIGINALITY REPORT

---

0%

SIMILARITY INDEX

2%

INTERNET SOURCES

3%

PUBLICATIONS

3%

STUDENT PAPERS

---

## PRIMARY SOURCES

---

Exclude quotes On

Exclude bibliography On

Exclude matches < 2%

# MANIFESTASI KEBIJAKAN SURAT EDARAN KEMENDIKBUD NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG PELAKSANAAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN DALAM MASA DARURAT PENYEBARAN CORONA VIRUS

---

## GRADEMARK REPORT

---

FINAL GRADE

/0

GENERAL COMMENTS

Instructor

---

PAGE 1

---

PAGE 2

---

PAGE 3

---

PAGE 4

---

PAGE 5

---

PAGE 6

---

PAGE 7

---

PAGE 8

---

PAGE 9

---

PAGE 10

---

PAGE 11

---

PAGE 12

---

PAGE 13

---

PAGE 14

---